



KAMIS, 20 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek-Proyek Di Dinas PUPR Provinsi

Potensi Kerugian Negara Rp 6,74 M

Seningga uang tersebut segera masuk ke kas daerah. Diantaranya kelebihan bayar proyek pembangunan Jalan DDTS Simpang Kompi-Pintu Air DDT Rp 49,95 juta. Dalam proyek ini denda keterlambatan Rp 10,76 juta. Kelebihan bayar pekerjaan Jalan Klutum-Simpang Pino Rp 440,19 juta dengan denda keterlambatan Rp 1,181 miliar. Ada pula Kekurangan volume pekerjaan Jalan Tes

Muara Aman Rp 31,12 juta (lihat grafis).

Kepala Inspektoral Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengatakan, mereka telah melakukan tindakan anjutan atas temuan-temuan dalam pemeriksaan keuangan. Untuk temuan yang masuk dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dia meminta rekanan mengembalikannya 60 hari setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017 diterbitkan. Jika tidak kooperatif mengembalikan temuan potensi kerugian Negara tersebut, maka dia selaku inspektur tidak akan segan-segan untuk membawa ke aparat penegak hukum (APH). "Kami mengimbau supaya lekas dikembalikan kalau tidak akan dibawa ke APH," katanya.

BENGKULU - Paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu tahun 2017 berpotensi merugikan keuangan negara Rp 6,74 miliar. Kerugian tersebut berasal dari beberapa paket proyek akibat kelebihan pembayaran dan juga denda akibat perpanjangan pekerjaan yang belum disetorkan oleh rekanan ke kas daerah.

Potensi kerugian negara tersebut saat ini tengah diupayakan oleh Inspektoral Provinsi Bengkulu untuk ditindaklanjuti.

NAMA PROYEK	POTENSI
6. Kelebihan bayar pekerjaan jalan Batik Nau Lubuk Banyau + Box Culvert Denda keterlambatan	Rp 23,37 juta Rp 121 juta
7. Kelebihan bayar pekerjaan Jalan Capo-Batas Sumsel	Rp 145,36 juta
8. Kelebihan bayar pekerjaan jalan Penarik -Lubuk Pinang Denda keterlambatan	Rp 100,57 juta Rp 479,12 juta
9. Kelebihan bayar pada pekerjaan Jalan Sp. Kedurang - Kb. Agung-Batu Ampar Denda keterlambatan	Rp 193,93 juta Rp 604,86 juta
10. Kelebihan bayar pekerjaan Jalan Kelindang Susup	Rp 189,15 juta
11. Kelebihan bayar pekerjaan Jalan Beringin Tiga-Bengko Denda keterlambatan	Rp 211,51 juta Rp 61,77 juta
12. Kelebihan bayar peningkatan Jalan Pasar Talo-Pasar Ngalam (Kabupaten Seluma) Denda	Rp 194,718 juta Rp 13,35 juta
13. Kelebihan bayar pembangunan jalan lingkungan dan jembatan kompleks RSUD M. Yunus tahap III Denda	Rp 226,46 juta Rp 11,98 juta.
14. Denda keterlambatan pada enam paket pekerjaan	Rp 248,58 juta
15. Pada Dinas PU-Bidang Sumber Daya Air belum dipungut Total	Rp 6,74 miliar

**Note: Belum dikurangi pengembalian oleh rekanan proyek atau pihak ketiga melalui Inspektoral.*



SUMBER BERITA

KAMIS, 20 DESEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek-Proyek Di Dinas PUPR Provinsi

Potensi Kerugian Negara Rp 6,74 M

Sudah ada contoh, proyek Jalan Enggano. Selaku Inspektur dia sudah berusaha untuk meminta pihak terkait mengembalikan kerugian Negara. Namun mereka tidak juga mengembalikannya. Sehingga akhirnya proyek ini dibawa ke ranah hukum. Saat ini orang-orang yang terlibat dalam proyek itu sedang menjalani hukuman. Lantaran divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. "Kebanyakan kasus korupsi yang ditangani oleh APH berasal dari audit BPK," katanya.

Massa mengatakan, dia bahkan berkali-kali diperiksa saat kasus Enggano tersebut disidik oleh Kejaksaan. Kemudian menjadi saksi di persidangan. "Ya karena tidak mau mengembalikan potensi kerugian Negara itu. Sehingga kami dari Inspektorat melaporkannya ke APH," terangnya.

Dia mengatakan, dari banyak temuan BPK Inspektorat tahun ini sudah menyelesaikannya atau menindaklanjutinya dengan progress 65 persen. Merupakan daerah tertinggi ke empat mampu menyelesaikan audit BPK tersebut. "Ini sudah menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun depan. Karena kita sudah mampu menindaklanjuti 65 persen temuan dari BPK," tutupnya.

Massa Sahaan mengatakan Inspektorat sudah berkomitmen untuk membersihkan Pemda Provinsi Bengkulu dari praktik korupsi. "Selain saya serahkan ke APH, juga akan kita korankan biar masyarakat tahu kalau dia bandel. Tidak usah lagi ikut tender," kata Massa.

Dia mengatakan ada beberapa cara Inspektorat akan mengganjal, pertama diganjal di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ketika bermain curang langsung *blacklist*, kemudian pada saat pelaksanaan tender, jika terjadi wanprestasi juga akan diblacklist. Ketika sudah jadi temuan potensi kerugian negara terhadap pekerjaan itu akan langsung diserahkan ke APH. "Biar masyarakat tahu, kalau dia bandel," katanya.

Bengkulu Zona Merah Korupsi

Dia juga menjelaskan, hasil pemetaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bengkulu masih berada di zona merah. Inspektorat sebagai lembaga APIP sudah bekerjasama dengan Korpsurgah di bawah bimbingan dan pantauan KPK sejak 2016-2018. Ada beberapa

langkah strategis yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. "Kepala daerah banyak yang kena operasi tangkap tangan (OTT). Kemudian setiap kali berurusan dengan itu selalu ditanyakan adalah dimana inspektur dimana APIP. Inspektorat yang dipersalahkan ketika ada OTT. Orang lain berbua kita yang cuci pirah," katanya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman mengatakan,

Inspektorat harus gencar dalam menindaklanjuti temuan BPK itu. Untuk rekanan yang membandel tidak mau mengembalikan potensi kerugian Negara, supaya bisa disurati supaya bisa segera menyelesaikannya. Jika dalam batas waktu tertentu tidak juga mengembalikannya, maka akan dibawa ke aparat penegak hukum (APH). "Ada surat pemberitahuan teguran dulu. Supaya mereka dengan adanya surat itu berfikir untuk mengembalikannya. Dari pada mereka harus berurusan dengan hukum," terangnya.

Dia menjelaskan dengan surat itu juga Inspektorat memiliki alasan sudah bekerja dengan baik, namun rekanan yang bandel tidak mau mengembalikan. "Kalau mereka bandel ini tergantung dari pada pemerintah daerah. Kalau dia tidak juga bisa mengembalikan, jangan lagi dikasih pekerjaan. Karena dianggap tidak patuh," terangnya. (del)